

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KOMISI INFORMASI  
 NO 1 TAHUN 2021 TENTANG  
 STANDAR LAYANAN INFORMASI  
 PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 NOMOR 01 TAHUN 2025

Pada hari ini, Jumat tanggal 20 bulan juni tahun 2025 bertempat di Kantor Desa Sanur Kauh telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANTFAAT JIKA DITUTUP
1	Berita sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
2	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
3	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
4	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
5	Penempatan jaringan, peralatan	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

	sandi dan tempat kegiatan sandi		membahayakan keamanan negara		
6	Lokasi Server	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan	Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
7	Internet Protocol/IP Address Private	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/berlaku	Memungkinkan adakanya penerobosan/penyalagunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses
8	Bandwidth Management	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
9	Sistem Manajemen Database	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	Menjaga keamanan jaringan komputer
10	Data Pribadi Pegawai	UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
11	Data Kependudukan meliputi :	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 54 dan pasal 55	Sampai ada rekomendasi dari pihak terkait mengenai permohonan data	Dapat Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang

12	Memorandum / - surat yang perlu dirahasiakan	-UU No. 18 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf H dan huruf J -UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 H	Selama masih digunakan/berlaku	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan pelaksanaan kegiatan
13	Peta Lokasi / Penyimpanan Arsip	-UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasar 17 huruf I -UU No. 43 Tahun 2003 tentang kearsipan	Tidak terbatas	Membahayakan keamanan arsip dan Lokasi penyimpanan	Mengamankan arsip dan lokasi penyimpanan (Kerahasiaan Lokasi Terjaga)
14	SK Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam dan dari jabatan struktural	-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Kuruf H	Sampai dengan pelaksanaan pelantikan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan / menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

Perbekel Desa Sanur Kauh



I MADE ADA, S.SOS